

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan HCV dan HCS Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan

Nurul Amri Komarudin^{1*} dan Chairul Anam Afgani²

¹*Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

²*Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

E-mail: nurul.amri.komarudin@uts.ac.id

Abstrak

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tutupan lahan yang tidak kurang dari 45% di antaranya merupakan hutan kawasan konservasi (taman nasional, suaka margasatwa dan hutan lindung). Kawasan konservasi ini memiliki High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dibuat dalam hal pengelolaan Kawasan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) untuk mengetahui kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan objek penelitian enam perusahaan swasta di bidang perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua dari enam perusahaan dalam penelitian ini yang memiliki area HCV dan tiga dari enam perusahaan yang memiliki kawasan HCS di area perkebunan kelapa sawitnya. Skor rata-rata pelaksanaan kebijakan pengelolaan HCV dan HCS yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi Sumatera selatan memiliki skor sebesar 100%, artinya perusahaan telah menerapkan kebijakan dan telah memenuhi indikator pengelolaan kawasan HCV dan HCS dengan baik.

Kata Kunci: implementasi, HCV, HCS, kebijakan, kelapa sawit

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tutupan lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, dan tidak kurang dari 45% merupakan hutan kawasan konservasi (taman nasional, suaka margasatwa dan hutan lindung). Kawasan konservasi tersebut memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value* HCV) dan nilai karbon tinggi (*High Carbon Stock*, HCS) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021). Oleh karena itu, identifikasi HCV dan HCS menjadi sangat penting sebagai persyaratan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya pengelolaan dan pemantauan kawasan HCV dan HCS juga sangat penting untuk menjaga kualitas dan ketahanan

ekosistem di kawasan tersebut dan sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan lindung (Nurjannah, dkk., 2016).

Kawasan *High Conservation Value* (HCV) atau dalam bahasa Indonesia adalah nilai konservasi tinggi (NKT) merupakan suatu kawasan baik lingkungan atau sosial yang di dalamnya terdapat habitat satwa liar, flora dan fauna yang dilindungi, daerah perlindungan resapan air dan situs arkeologi (kebudayaan) yang mana semua itu memiliki nilai-nilai yang diperhitungkan secara signifikan dan sangat bernilai penting baik secara lokal, regional ataupun global (HCV Toolkit Indonesia, 2008).

Prinsip dasar dari konsep HCV adalah mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara menjamin pemeliharaan atau peningkatan kawasan HCV tersebut. Dalam hal ini, pendekatan HCV berupaya membantu perusahaan dan stakeholder terkait untuk mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi jangka panjang. Konsep HCV pada awalnya didisain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan produksi, dengan cepat konsep ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Pada sektor sumber daya terbaharui, HCV digunakan sebagai alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan sosial yang negatif dalam pembangunan perkebunan, termasuk dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit (HCV Toolkit Indonesia, 2008).

Kawasan *High Carbon Stock* (HCS) atau yang dalam Bahasa Indonesia adalah stok karbon tinggi (SKT) merupakan kawasan yang memiliki stok karbon tinggi, pendekatan HCS dilakukan dengan membedakan antara hutan alami dengan lahan terdegradasi, pohon kecil, semak belukar, dan atau hanya rerumputan Pendekatan ini membagi kawasan menjadi enam jenis kelas vegetasi yang berbeda (stratifikasi) dari mulai kelas vegetasi yang memiliki stok karbon tinggi sampai kelas vegetasi yang memiliki stok karbon rendah dengan deskripsi stratifikasi sebagai berikut: Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Sedang (HK2), Hutan Kerapatan Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM), dan Lahan Terbuka (LT) (HCV Toolkit Indonesia, 2008).

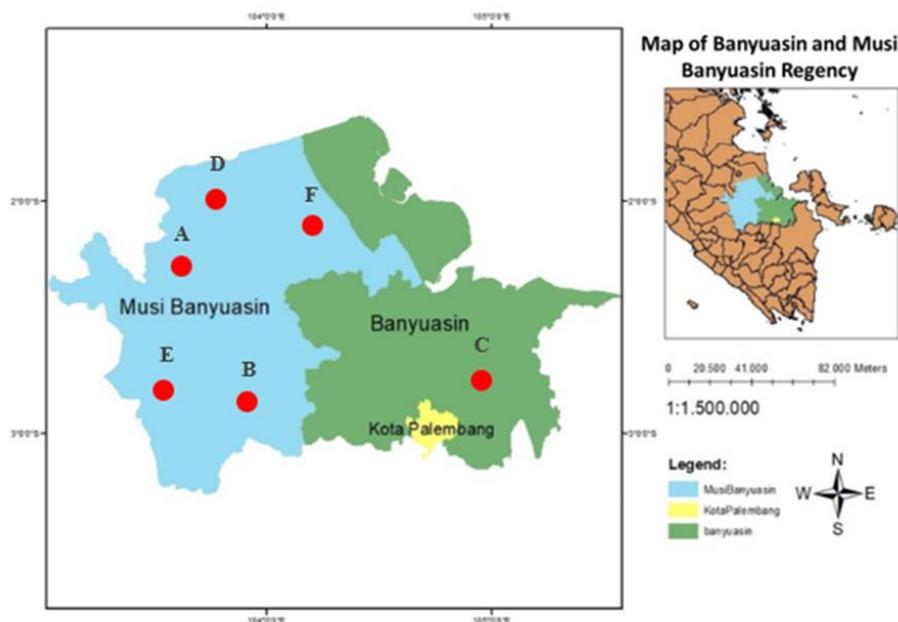
Beberapa perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kawasan HCV dan HCS di sekitar perkebunan kelapa sawit, dan sudah ada kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan kawasan HCV dan HCS pada perkebunan kelapa sawit tersebut yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 Tentang Pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran No 10/SE/VII/2015 Tentang Penerbitan izin pada areal Hutan Bernilai Konservasi Tinggi akan tetapi kebijakan tersebut diindikasikan belum terimplementasi dengan baik.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Ayik *et al.*, 2017). Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Adapun bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana (Korten & Syahrir, 1988). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan yang telah dibuat terkait dengan pengelolaan kawasan *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS) untuk mengetahui gap antara kebijakan yang dibuat dengan implementasi di lapangan. Sehingga harapannya studi ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengeolaan perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terdapat suatu kawasan HCV dan HCS.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada enam perusahaan swasta di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada perusahaan A, B, C, D, E dan F yang mana ke enam perusahaan ini memiliki karakteristik khusus yaitu (1) memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit diatas 3000 ha; (2) sedang dalam tahap sertifikasi atau sudah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainability Palm Oil); dan (3) perusahaan tersebut memberikan izin kepada peneliti untuk dijadikan sebagai responden. Keenam perusahaan tersebut berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Perusahaan A, B, D, E dan F , dan di Kabupaten Banyuasin untuk perusahaan C (Gambar 1). Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni-Agustus tahun 2019.



Gambar 1. Lokasi Perusahaan.

Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Objek analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan swasta di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara administrasi terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, informasi dan data penelitian diperoleh melalui responden dan informan. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan objek penelitian dilakukan kepada enam perusahaan. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu responden diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan nama judgement dan quota sampling (Etikan *et al.*, 2016).

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan melalui survei, observasi, serta wawancara mendalam. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam

mengimplementasikan kebijakan lingkungan dan menerapkan pengelolaan perkebunana kelapa sawit yang berkelanjutan. Kuesioner diberikan kepada responden untuk diisi dan peneliti membantu dalam pengisian untuk mencegah terjadinya kesalahan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran lokasi penelitian serta aktivitas di perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendukung kebutuhan data yang diperlukan. Penelitian diikuti wawancara mendalam untuk memperkuat argumentasi dari data kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengikuti panduan wawancara terstruktur kepada responden dan informan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menentukan skor implemementasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut (Febian *et al.*, 2013):

$$I = \frac{\text{Jumlah indikator terpenuhi}}{\text{Jumlah indikator total}} \times 100\%$$

dari perhitungan skoring tersebut di dapat persentase dari setiap komponen dengan kriteria sesuai dengan yang tertera pada (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria skoring implementasi

Persentase (%)	Kriteria
96 – 100	Persyaratan atau kebijakan telah di implementasikan dengan baik
90 – 95	Persyaratan atau kebijakan telah di implementasikan dengan baik tetapi belum konsisten
76 – 89	Beberapa persyaratan atau kebijakan telah di implementasikan tetapi masih belum konsisten
51 – 75	Masih terdapat persyaratan atau kebijakan yang belum di implementasikan dengan baik
0 – 50	Tidak dilakukan implementasi sesuai dengan kebijakan yang ada. Perusahaan masih perlu pelatihan khusus dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pengelolaan Kawasan HCV dan HCS

Tabel 2 menunjukkan identifikasi pengelolaan kawasan HCV pada enam perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan tabel tersebut dua dari enam perusahaan terdapat kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) di dalam areal perkebunannya, kedua perusahaan tersebut adalah Perusahaan D dan F, dengan masing-masing luas lahan HCV seluas 5 ha dan 4.1 ha.

Kedua perusahaan tersebut telah mempunyai *Standar Opearsional Prosedure* (SOP) dalam melakukan pengelolaan lahan HCV diantaranya perusahaan D dan F, keduanya mempunyai panduan terkait penentuan tapal batas, pembuatan papan nama Kawasan HCV, dan pengelolaan sempedan sungai-*riperian belt*, terdapat satu perbedaan pada kedua perusahaan tersebut, yang mana perusahaan D memiliki SOP terkait dengan pelaksanaan pemetaan lahan gambut sedangkan perusahaan F mempunyai SOP terkait perlindungan terhadap satwa langka. Hal ini disebabkan oleh adanya luasan lahan gambut pada perusahaan D seluas 3 ha dan adanya Kawasan hutan tempat satwa dilindungi pada perusahaan F seluas 2.5 ha.

Tabel 2. Identifikasi pengelolaan Kawasan HCV

Perusahaan	Identifikasi pengelolaan Kawasan HCV	
	Luas Kawasan HCV (ha)	SOP Pengelolaan Lahan HCV
A	0	-
B	0	-
C	0	-
D	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tapal batas 2. Membuat papan nama kawasan HCV 3. Mengelola sempadan sungai-riperian belt 4. Melindungi satwa langka 5. Melakukan pemetaan lahan gambut
E	0	-
F	4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tapal batas 2. Membuat papan nama kawasan HCV 3. Mengelola sempadan sungai-riperian belt 4. Melindungi satwa langka

Sumber: Pengolahan data primer (2019).

Tabel 3 menunjukkan identifikasi pengelolaan kawasan karbon tinggi (HCS) pada enam perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan tabel tersebut tiga dari enam perusahaan, terdapat kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCS) di dalam areal perkebunannya, ketiga perusahaan tersebut adalah Perusahaan A, B, dan D, dengan masing-masing luas lahan HCS seluas 5 ha, 5.5 ha, dan 6 ha. Ketiga perusahaan tersebut sudah mempunyai Standar Opearsional Prosedu (SOP) dalam melakukan pengelolan lahan HCC daintaranya, ketiga perusahaan tersebut memiliki SOP terkait penentuan tapal batas dan pembuatan nama kawasa HCS.

Tabel 3. Identifikasi Pengelolaan Kawasan HCS

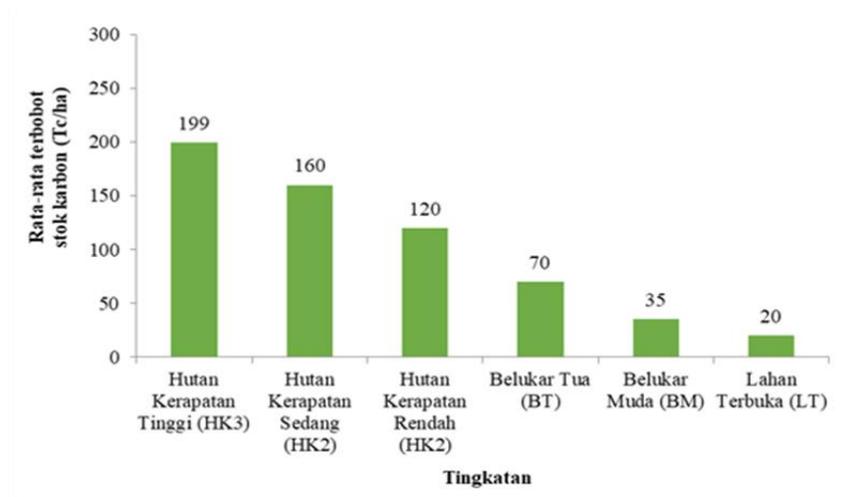
Perusahaan	Identifikasi pengelolaan Kawasan HCV	
	Luas Kawasan HCV (ha)	SOP Pengelolaan Lahan HCV
A	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tapal batas 2. Membuat papan nama kawasan HCS
B	5.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tapal batas 2. Membuat papan nama kawasan HCS
C	0	-
D	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tapal batas 2. Membuat papan nama kawasan HCS
E	0	-
F	0	-

Sumber: Pengolahan data primer (2019).

Adapun pelaksanaan pengelolaan kawasan HCV dan HCS dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: *Pertama*, mengidentifikasi kawasan HCV dan HCS dengan melakukan penjajagan, dialog dan verifikasi; *Kedua*, melakukan pengelolaan kawasan HCV dan HCS dengan menentukan tapal batas kawasan HCV dan HCS dan melakukan pemasangan papan penanda (*sign board*) pada kawasan HCV dan HCS; *Ketiga*, membuat papan nama kawasan HCV dan HCS dengan menggunakan materi dan teknik pemasangan plang, melakukan perawatan plang, menentukan ukuran huruf pada setiap plang dan jenis batas, menentukan macam-macam plang dan teknis pemasangan plang tersebut. *Kelima*, mengelola sempadan sungai *riperian belt* dengan cara membuat pembatas tanda-tanda pada sempadan sungai, menentukan lebar daerah sempadan sungai, melakukan pemasangan tanda pada garis

sempadan sungai dan memonitoring kegiatan yang berhubungan dengan sempadan sungai; *Keenam*, perlindungan satwa langka dengan cara melakukan tindakan *preventive*, melakukan pengawasan terhadap aturan perlindungan satwa langka, menanggapi upaya-upaya konservasi lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan; *Ketujuh*, mengidentifikasi lahan gambut dengan cara melakukan identifikasi lahan gambut dan melakukan pemetaan lahan gambut.

Nilai Karbon Tinggi dari Berbagai Tutupan Lahan



Gambar 2. Rata-rata terbobot nilai stok karbon dari berbagai tutupan lahan.

Sumber: (Golden Agri-Resources and SMART 2019).

Gambar 2 menunjukkan rata-rata terbobot nilai karbon stock dari berbagai tutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dari mulai kelas vegetasi yang memiliki stok karbon tinggi sampai dengan kelas vegetasi yang memiliki stok karbon rendah. Berdasarkan gambar tersebut pohon dengan diameter (DBH) > 30 cm mendominasi strata dengan nilai karbon yang tinggi dengan kelas vegetasi hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan sedang dan hutan kerapatan rendah (HK 1, 2 dan 3); sedangkan pohon-pohon dengan diameter (DBH) < 20 cm mendominasi strata dengan nilai karbon yang lebih rendah yaitu belukar tua, belukar muda dan lahan terbuka (BT, BM dan LT). HK3, HK2 dan HK1 merupakan hutan alam dengan tajuk tertutup beragam dari hutan kerapatan tinggi sampai rendah yang didominasi oleh spesies klimaks (HCV Toolkit Indonesia, 2008).

Belukar Tua (BT) atau hutan regenerasi muda merupakan Hutan yang sangat terganggu atau kawasan hutan dalam tahap regenerasi menuju struktur aslinya. Distribusi diameter didominasi oleh pohon dengan DBH 10-30 cm dengan frekuensi spesies pionir yang lebih tinggi dibandingkan dengan HK1. Dalam kelas tutupan lahan ini mungkin terdapat kawasan-kawasan kecil yang berupa kawasan pertanian atau plasma. Belukar Muda (BM) merupakan lahan yang dulunya berupa hutan tetapi hutan tersebut telah dibuka dalam waktu yang belum terlalu lama (baru dibuka) yang didominasi oleh belukar rendah dengan penutupan tajuk yang terbatas, mencakup lahan dengan rerumputan tinggi, tumbuhan paku-pakuan dan spesies pohon pionir yang tumbuh secara tersebar. Beberapa patch hutan tua juga mungkin dijumpai dalam kategori lahan ini dan Lahan Terbuka (LT) merupakan lahan yang baru dibuka dan sebagian besar terdiri dari rerumputan atau tanaman dan sedikit tumbuhan berkayu.

Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan HCV dan HCS

Tabel 4 menunjukkan implemementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan HCV dan HCS berdasarkan SOP yang dimiliki setiap perusahaan, Berdasarkan tabel tersebut perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi semua indikator terkait pengelolaan

Kawasan HCV dan HCS artinya persyaratan atau kebijakan telah di implementasikan dengan baik. Menurut Nasir & Noch (2009) tingkat implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan di lapangan pasti berbeda-beda yang mana tingkat perhatian terhadap lingkungan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lingkungan, dan berbanding lurus juga dengan peningkatan kinerja perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki perhatian yang tinggi terhadap lingkungan, maka kinerja lingkungan dan kinerja perusahaan juga akan meningkat, yang mana akan berpengaruh kepada produktifitas dan meningkatnya profit perusahaan (Rhebergen, 2018).

Tabel 4. Implementasi Kebijakan pengelolaan HCV dna HCS berdasarkan SOP

No	Pengelolaan Berdasarkan SOP	Jumlah Indikator	Indikator Terpenuhi
1	HCV	6	6
2	HCS	2	2
Jumlah		8	8
Skor Implementasi (%)		100	

Sumber: Pengolahan data primer (2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya dua dari enam perusahaan pada studi ini yang memiliki kawasan HCS dan tiga dari enam perusahaan yang mempunyai kawasan HCV di areal perkebunan kelapa sawitnya. Skor rata-rata implementasi kebijakan pengelolaan HCS dan HCV yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi sumatera selatan memiliki skor 100%, artinya perusahaan telah meingimplemntasikan kebijakan dan telah memenuhi indikator pengelolaan kawasan HCV dan HCS dengan baik. Pemerintah perlu melakukan memberikan ketegasan kepada perusahaan untuk memenuhi kriteria lingkungan lainnya seperti ISPO, meliputi pemenuhan sertifikasi lingkungan, pengelolaan lahan gambut, pelestarian birodiveristas dan keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan tanggung jawa sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayik, C., Ayatac, H., Sertyesilisik, B., 2017. *A Gap Analysis In Urban Sustainability Studies and Urban Sustainability Assessment Tools*. Architecture Research. 7: 1-15. doi:10.5923/j.arch.20170701.01.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. *Buku Statistik Perkebunan Tahun 2008 – 2021*. [Internet] http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/isi_dt5thn_bun.php.
- Etikan, I., Musa, S. A., Alkassim, R. S., 2016. *Comparison Sampling and Purposive Sampling*. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. 5: 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- Febian, A., Admaja A. F. S., 2013. *Study of The Directorate od Standardization Readiness in Implementing SNI ISO/IEC 17065*. Buletin POS dan Telekomunikasi. 11(3): 223-234.
- High Concervation Value Toolkit Indonesia (HCV Toolkit Indonesia). 2008. *Panduan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*.
- Korten, D.C., dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasir, M., dan Noch, M. F., 2009. *Gap Analisis Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur*. Laporan Final. WWF: Jakarta.
- Nurjannah, S., Amzu, E., dan Sunkar, A., 2016. *Peran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Bagi Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 3(1): 68-77. DOI: <http://dx.doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i1.15237>.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Tentang Penerbitan Izin pada Areal Hutan Bernilai Konservasi Tinggi.*
- Rhebergen, T., 2018. *Yield Gap Analysis and Entry Points For Improving Productivity on Large Oil Palm Plantations and Smallholder Farm In Ghana.* Agricultural System. 165: 14-25. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.05.012>.